BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan kualitas pendidikan harus menjadi prioritas utama bagi sebuah bangsa, karena pembangunan sebuah bangsa tidak terlepas dari sebuah pendidikan yang berkualitas dan bermutu. Oleh karena, itu bagi sebuah bangsa yang ingin negaranya mampu bersaing dengan negara lain dan memiliki taraf pendidikan yang lebih baik, maka dunia pendidikan harus diperbaiki sedemikian rupa.

Perkembangan ilmu pengetahuan sangat ditentukan oleh perkembangan dunia pendidikan, dimana dunia pendidikan mempunyai peran yang sangat strategis dalam menentuakn arah maju mundurnya kualitas pendidikan. Hal ini bisa dirasakan ketika sebuah lembaga pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan yang benar-benar bagus, maka dapat dilihat dari kualitasnya, berbeda dengan lembaga pendidikan yang melaksanakan pendidikan hanya dengan sekedarnya maka hasilnya pun biasa-biasa saja.[1]

Pendidikan di negara kita apakah sudah bisa dikatakan memiliki kualitas yang baik, sepertinya masih belum karena banyak sekali cercaan dan carut marut yang dilontarkan oleh berbagai pihak. Bahkan beberapa kali melakukan perubahan sistem pendidikan, masih belum menunjukkan kemajuan yang berarti.

---

[1] Hari Suderajad, 2005, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MBS)*, (Bandung: CV. Cipta Cekas Grafika), hal. 1

Padahal tantangan demi tantangan yang dihadapi semakin besar dan penuh persaingan.

Inilah wajah pendidikan di negara kita. Tentunya perlu dicarikan jalan keluarnya secepat mungkin. Semua pihak ikut memikirkan bagaimana caranya agar mampu mendongkrak pendidikan di Republik ini sehingga memiliki daya saing dalam era global.

> Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa "pendidikan merupakan kunci kemajuan, semakin baik kualitas pendidikan yang diselenggarakan oleh suatu masyarakat/bangsa, maka akan diikuti dengan semakin baiknya kualitas masyarakat/bangsa tersebut. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran peserta didik secara afektif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara."[2]

Peningkatan kualitas (mutu) pendidikan, terutama untuk menghasilkan insan yang berkualitas, memiliki keimanan dan ketakwaan yang tinggi kepada Tuhan Yang Maha Esa, sekolah harus mengubah pradigma dan manajemen pendidikannya. Sekolah mesti belajar untuk bisa berjalan dengan sumber daya yang ada namun berkualitas, sayangnya sebagian sekolah masih memandang bahwa mutu pendidikan akan meningkat jika memiliki dana yang lebih besar, padahal dana bukanlah hal utama dalam perbaikan mutu pendidikan. Mutu pendidikan akan meningkat bila terdapat faktor yang bisa menunjang pelaksanaan pendidikan tersebut, seperti manajemen sekolah yang baik yang mencakup di

---

[2] *Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan Undang-undang RI No. 20 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, 2005, (Bandung: Fokusmedia), hal. 95

dalamnya pelaksanaan manajemen kurikulum, pelaksanaan manajemen kesiswaan, pelaksanaan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan, pelaksanaan manajemen sarana dan prasarana pendidikan dan pelaksanaan manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat.

Salah satu kebijakan pemerintah dalam dunia pendidikan sekarang ini adalah memberikan kebebasan atau otonomi kepada sekolah untuk mengelola rumah tanggannya dengan sebaik-baiknya. Pemberian otonomi itu berlandaskan kepada Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (5) dikemukakan bahwa *Otonom daerah* adalah hak, wewenang, dan kewajiban *daerah otonom* untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[3]

Pada saat ini dibutuhkan sistem pendidikan yang demokratis dalam bentuk desentralisasi pendidikan. Dengan desentralisasi pendidikan, akan melahirkan wawasan baru tentang konsep pendidikan, diantaranya Manajemen Berbasis Sekolah (MBS/ *School Based Management*), dan Pendidikan Berbasis Masyarakat (*Community Based Education*).

Terkait dengan ini, maka munculah suatu pemikiran ke arah pengelolaan pendidikan yang memberi keleluasaan kepada sekolah untuk mmengatur dan melaksanakan berbagai kebijakan secara luas, pemikiran ini dalam perjalanannya disebut Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).[4]

---

[3] Hasbullah, 2006, *Otonomi Pendidikan (Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan),* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hal. 8

[4] E. Mulyasa, 2002, *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), hal. 4

Secara yuridis penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dijamin oleh peraturan perundang-undangan sebagai berikut:[5] 1) Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 5 ayat (1) "pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah atau madrasah". 2) Undang-undang No. 25 Tahun 2003 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004 pada Bab VII tentang Bagian Program Pembangunan Bidang Pendidikan, khususnya sasaran (3), yaitu "terwujudnya manajemen pendidikan yang berbasis pada sekolah dan masyarakat (*School Community Based Management*)". 3) Keputusan Mentri Pendidikan Nasional No. 44 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Dewan Pendidikan Dan Komite Sekolah. 4) Kepmendiknas No. 087 tahun 2004 tentang Standar Nasional Pendidikan, Khususnya Standar Pengelolaan Sekolah, Yaitu Manajemen Berbasis Sekolah.

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) memberikan otonomi yang luas kepada sekolah. Otonomi sekolah diberikan agar sekolah leluasa mengelola sumber daya yang ada, sesuai dengan prioritas serta tanggap terhadap kebutuhan setempat.

Pada hakikatnya segala sesuatu di dunia ini perlu adanya pengaturan dan pengelolaan, agar kegiatan yang dijalankan dapat berjalan secara teratur dengan

---

[5] Rohiat, 2008, *Manajemen Sekolah Teori Dasar dan Praktik Dilengkapi dengan Contoh Rencana Strategis Dan Rencana Operasional*, (Bengkulu, PT. Rineka Cipta), hal. 51

sebaik-baiknya. Allah Swt. Berfirman dalam surah As-Sajadah ayat 5 sebagai berikut :

يُدَبِّرُ ٱلۡأَمۡرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلۡأَرۡضِ ثُمَّ يَعۡرُجُ إِلَيۡهِ فِي يَوۡمٖ كَانَ مِقۡدَارُهُۥٓ أَلۡفَ سَنَةٖ مِّمَّا تَعُدُّونَ.

Ayat tersebut diatas menjelaskan bahwa demi kelancaran di dunia, ketertiban dan keteraturan suatu usaha, maka diperlukan adanya pengaturan agar dikemudian hari tidak ada kesalahan dalam mengambil seuatu keputusan atau kebijakan.

Demikian halnya pada bidang pendidikan yang ada di sekolah, agar dapat berjalan dengan lancar dan teratur, maka diperlukan adanya pengaturan dan pengelolaan yang sebaik-baiknya agar dapat mencapai tujuan pendidikan.

Berkaitan dengan permasalahan peningkatan mutu pendidikan, maka seorang kepala sekolah harus bisa mengubah pola pikir mereka dalam menjalankan lembaga pendidikannya, di dalam Al Qur’an tercantum firman Allah Stw. surah Ar Ra’d, ayat 11 yaitu:

لَهُۥ مُعَقِّبَٰتٞ مِّنۢ بَيۡنِ يَدَيۡهِ وَمِنۡ خَلۡفِهِۦ يَحۡفَظُونَهُۥ مِنۡ أَمۡرِ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوۡمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمۡۗ .....

Ayat diatas menjelaskan tentang sebuah kaum yang tidak akan pernah dirubah oleh Allah akan keadaan mereka, kecuali mereka sendiri yang akan mengubah keadaan mereka.

Jika sebuah masyarakat atau negara ingin membuat sebuah perubahan, maka mereka sendiri lah yang harus merubah keadaan mereka, apalagi di dalam dunia pendidikan. Apabila penyelenggaraan pendidikan monoton, maka tidak akan terjadi perubahan apa-apa dalam kualitas (mutu) pendidikan itu.

Diberikannya otonomi pendidikan yang luas pada sekolah merupakan kepedulian pemerintah terhadap gejala-gejala yang muncul di masyarakat serta upaya peningkatan mutu pendidikan secara umum, pemberian otonomi ini menuntut pendekatan manajemen yang lebih kondusif di sekolah agar dapat mengakomodasi seluruh keinginan sekaligus memberdayakan berbagai komponen masyarakat secara efektif guna mendukung kemajuan dan sistem yang ada di sekolah. Dalam kerangka inilah Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) tampil sebagai alternatif pradigma baru manajemen pendidikan yang ditawarkan. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan suatu konsep yang menawarkan otonomi yang ada pada sekolah untuk menentukan kebijakan sekolah dalam rangka meningkatkan mutu efisien dan pemerataan pendidikan agar dapat mengakomodasi keinginan masyarakat setempat serta menjalin kerja sama yang erat antaea sekolah dengan masyarakat dan pemerintah.[6]

Dipilihnya MBS sebagai model desentralisasi pendidikan untuk pendidikan dasar dan menengah karena diyakini model ini akan mempermudah pencapaian tujuan pendidikan. Sementara itu kebijakan MBS ini masih baru dan merupakan hasil adopsi dari negara lain, tanpa adanya dukungan sumberdaya dan

---

[6] E. Mulyasa, *Ibid*., hal 11

partisipasi aktif dari masyarakat dalam pelaksanaannya maka penyimpangan dapat terjadi dan tujuan peningkatan akan sulit di realisasikan.

Adanya kebijakan yang diberikan pemerintah kepada sekolah tentang Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yaitu bagaimana MBS yang dilakukan oleh sekolah dan hasil penelitian tersebut akan dijadikan bahan penyusunan skripsi yang berjudul: "Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMAN 1 Pengaron Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan mengenai "Bagaimana kebijakan kepala sekolah Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Pengaron Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar dalam Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan", adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kebijakan kepala sekolah dalam Penerapan Manajemen Berbaisis Sekolah (MBS) dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Pengaron Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar?
2. Apa saja faktor pendukung serta penghambat kebijakan kepala sekolah dalam Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dalam

Meningkatkan Mutu Pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Pengaron Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Kebijakan Kepala Sekolah dalam Penerapan Manajemen Berbaisis Sekolah (MBS) dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Pengaron Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar.
2. Untuk mengetahui apa saja Faktor Pendukung dan Penghambat Kebijakan Kepala Sekolah dalam Penerapan Manajemen Berbaisis Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Pengaron Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar.

D. Signifikansi Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Hasil penelitian ini juga diharapkan mampu memperkaya dan mengembangkan ilmu pendidikan, khususnya manajemen pendidikan di mana kepala sekolah dan guru merupakan manajer di bidang pendidikan yang berperan besar untuk meningkatkan mutu berbasis sekolah dalam rangka mengantisipasi kebutuhan terhadap sumber daya manusia yang berkualitas dalam era otonomi daerah. Hasil penelitian ini juga dapat

dijadikan bahan bagi pihak-pihak yang ingin meneliti masalah ini lebih mendalam lagi di masa-masa yang akan datang.

Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan bagi kepala sekolah dan guru-guru untuk lebih baik lagi dalam pengelolaan pendidikan dan mampu meningkatkan mutu pendidikan ke taraf yang lebih tinggi di SMAN 1 Pengaron Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar.

Sebagai bahan masukan bagi kepala sekolah dan guru dalam mengatasi hambatan-hambatan kebijakan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah dengan menggali dan memanfaatkan kekuatan dan potensi yang dimiliki.

Sebagai bahan masukan bagi para orang tua siswa, masyarakat dan pemerintah dalam rangka menjadikan sekolah sebagai bisnis utama menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat daerah.

E. Definisi Operasional

Berkaitan dengan judul yang ditegasakan di atas, maka penulis mendefinisikan pengertian dari masing-masing istilah tersebut agar tidak terjadi salah penafsiran dalam memahami isi penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti, yaitu sebagai berikut:

1. Penerapan

   Penerapan dalam kamus besar bahasa indonesia diartikan sebagai pemaiakaian suatu cara, metode atau suatu teori untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok

atau golongan yang telah terencana sebelumnya untuk mencapai sebuah tujuan yang ditetapkan.

2. Manajemen Berbasis Sekolah

Manajemen Berbasis Sekolah berasal dari tiga suku kata yaitu, manajemen, berbasis, dan sekolah. Bila diuraikan satu persatu, mananjemen adalah pengkoordinasian dan penyerasian sumber daya melalui sejumlah input manajemen untuk mencapai tujuan atau untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Berbasis berarti "berdasarkan pada" atau "berfokus pada", sedangkan sekolah adalah "suatu organisasi terbawah dalam jajaran Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas)" yang bertugas memberikan bekal "kemampuan dasar" kepada peserta didikatas dasar ketentuan-ketentuan yang bersifat legalistik dan profesionalistik.[7]

Jadi penerapan manajemen berbasis sekolah ialah sebuah cara atau metode salah satu wujud dari reformasi pendidikan yang menawarkan kepada sekolah untuk menyediakan pendidikan yang lebih baik dan memadai bagi peserta didik. Salah satu contoh dari Manajemen Berbasis Sekolah yang telah dilaksanakan oleh Kepala Sekolah di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Pengaron Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar ini adalah pengelolaan pendidikan, manajemen kurikulum, manajemen sarana prasarana, manajemen sumber daya

[7] Mulyono, 2007, *Manajemen Pendidikan untuk Sekolah dan Madrasah,* (Universitas Islam Negeri Malang), hal. 150

manusia, manajemen keuangan sekolah (pembiayaan sekolah), manajemen humas (hubungan sekolah dengan masyarakat).

3. Mutu Pendidikan

Kata mutu dapat diartikan dengan kualitas, derajat, tingkat.[8] Sedangkan pendidikan sendiri sudah menjadi bagian dari Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan pendidikan sebagai usaha sadar untuk mempersiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau latihan bagi peranannya pada masa yang akan datang.

Jadi yang dimaksud mutu pendidikan ialah sebuah upaya sadar manusia dimana warga masyarakat berusaha membantu pihak-pihak yang belum dewasa agar menjadi manusia yang lebih dewasa dan agar bersama-sama mencapai taraf kemampuan kedeewasaan yang lebih baik dan membentuk masyarakat yang lebih berkualitas agar mampu menjawab tantangan-tantangan zaman di masa yang akan datang.

4. Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Pengaron Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar

Sekolah Menengah Atas Negeri (SMA) 1 Pengaron adalah lembaga pendidikan yang dinaungi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar yang

---

[8] E. Mulyasa, *Op. Cit.*, hal. 505

berada di Jl. Sekumpul Ujung Desa Bincau No.03 Rt.05 Rw.03 Martapura. Sedangkan SMAN 1 Pengaron sendiri beralamatkan di Jl. Pahlawan Rt.01 Rw.01 Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar yang sekarang telah dikepalai oleh bapak Nasruddin, M. Pd. Letak sekolah yang berada dekat dengan bahu jalan memungkinkan orang dapat mengetahui dan melihat dengan cukup jelas bagaimana bentuk fisik sekolah tersebut yang memiliki beberapa sarana prasarana yang menjadi daya tarik sekolah tersebut, dengan seperti itu dapat memungkinkan ketertarikan yang cukup baik bagi masyarakat yang ingin bersekolah disana.

Memiliki sarana prasarana yang memadai dan menurut Standar Pelayanan Minimum (SPM) adalah sebuah langkah awal bagi sekolah untuk menjadi sekolah yang bermutu.

F. Sistematika Penulisan

Penyusunan penelitian ini terdiri dari lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi uraian tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, alasan memilih judul, tujuan penelitian, signifikasi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan teoretis, berisi uraian tentang Pengertian Kebijakan Pendidikan, Perkembangan Kebijakan Pendidikan, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Sebagai Paradigma Baru Pengelolaan Pendidikan, serta Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Perumusan Kebijakan Pendidikan.

Bab III Metode Penelitian, berisi uraian tentang Jenis dan Pendekatan Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Data, Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data, Analisis Data, Teknik Pengolahan Data, dan Prosedur Penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, berisi uraian tentang Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Penyajian Data, dan Pembahasan Hasil Penelitian.

Bab V Penutup, berisi tentang Simpulan dan Saran.